

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitas yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Salah satu pelayanan kesehatan di masyarakat adalah puskesmas. Berdasarkan permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya. Pelayanan kefarmasian meliputi dua kegiatan yaitu kegiatan pelayanan kefarmasian dan manajemen pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

Pengelolaan obat dipuskesmas perlu diteliti karena pengelolaan obat yang efisien sangat menentukan keberhasilan manajemen puskesmas secara keseluruhan, untuk menghindari perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat dan tidak rasional sehingga perlu dilakukan pengelolaan obat yang sesuai.

Peningkatan pelaksanaan pengelolaan obat secara terus menerus perlu dilakukan mengingat bahwa obat merupakan aspek penting dalam pelayanan

kesehatan serta biaya yang diperlukan untuk pengadaan obat sehingga memenuhi program pelayanan kesehatan dipuskesmas. Penggunaan obat dan pengelolaan obat yang kurang efektif akan mengakibatkan tingkat ketersediaan obat menjadi berkurang, stok obat menjadi kosong, banyaknya obat yang menumpuk, serta biaya yang menjadi mahal (Nurniati, dkk, 2016)

Berdasarkan hasil penelitian Syukriati dkk (2016), pengelolaan obat perlu dilakukan dengan baik karena akan menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan obat yang efisien, efektif, dan rasional. Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian jenis obat yang tersedia dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) : 64,70 % - 73,51%, ketepatan permintaan obat 2,28% - 24,47%, ketepatan distribusi 4,66% - 35,59 %, presentase obat yang tidak diresepkan 5,00% - 23,49%, peresepan obat generik 97,27% - 100%, perbedaan pencatatan kartu stok dengan jumlah fisik obat 0,00% - 13,13%. Maka pengelolaan obat pada puskesmas ini belum baik, karena belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian Yuliana dkk (2019), beberapa permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan obat terutama obat program, yaitu terjadinya kekosongan obat, obat berlebih dan obat kadaluarsa. Hal ini dapat mengganggu upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan dan keterjangkauan obat serta dapat meningkatkan prevalensi penyakit menular, sehingga perlu dilakukan Evaluasi Perencanaan dan Distribusi Obat Program di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini ada 8 indikator yang belum memenuhi standar, yaitu ketepatan perencanaan (6,1%), penyimpangan perencanaan (5,85%), tingkat ketersediaan obat (28 bulan), persentase obat kadaluarsa (8,33%), persentase penyimpangan obat yang didistribusikan (1,9%), ITOR (1,15 kali), rata-rata waktu kekosongan obat (30 hari), persentase stok obat mati (25%). Faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu koordinasi yang belum optimal, pencatatan dan pelaporan belum diperbaharui dan keterbatasan dan atau keterlambatan realisasi dana operasional.

Berdasarkan hasil observasi awal pada Puskesmas Sipatana dan Puskesmas Tapa, ada beberapa masalah yang terkait pengelolaan obat. Puskesmas Sipatana

berkedudukan di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo tepatnya depan Lapangan Bulota Jalan Ahmad Arbie Kelurahan Bulotadaa Barat. Pada puskesmas sipatana masih sering terjadi kekosongan obat karena instalasi farmasi tidak mengadakan jumlah dan jenis obat yang diinginkan sehingga terkadang puskesmas membeli sendiri ketersediaan obat dengan dana dan atas persetujuan puskesmas, obat yang tidak tersedia biasanya seperti metformin, zink, oxitocin injeksi. Untuk obat yang mengalami masa *expired date* di puskesmas sipatana sendiri tidak mengadakan pemusnahan obat secara langsung tetapi dibuat berita acara untuk diserahkan ke instalasi farmasi kota yang akan melakukan pemusnahan.

Puskesmas Tapa adalah puskesmas yang terletak di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, pada puskesmas ini masih sering terjadi kekosongan obat karena instalasi farmasi tidak mengadakan jumlah dan jenis obat yang diinginkan, salah satunya obat propiltiurasil (PTU), untuk obat yang mengalami masa *expired date* di puskesmas tapa sendiri tidak melakukan pemusnahan obat sehingga mengakibatkan penumpukan obat di puskesmas.

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan di Puskesmas Sipatana dan Puskesmas Tapa maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kedua puskesmas agar dapat dilihat dan dibandingkan proses tahapan pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, pemantauan dan evaluasi apakah sudah sesuai dengan permenkes No 74 Tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan obat di Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo dan Puskesmas Tapa Kabupaten Bone Bolango ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengevaluasi pengelolaan obat di Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo dan Puskesmas Tapa Kabupaten Bone Bolango.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui perencanaan obat di Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo dan Puskesmas Tapa Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui pengadaan obat di Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo dan Puskesmas Tapa Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui penerimaan obat di Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo dan Puskesmas Tapa Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.
4. Untuk mengetahui penyimpanan obat di Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo dan Puskesmas Tapa Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.
5. Untuk mengetahui pendistribusian obat di Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo dan Puskesmas Tapa Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.
6. Untuk mengetahui pemusnahan dan penarikan obat di Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo dan Puskesmas Tapa Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.
7. Untuk mengetahui pengendalian obat di Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo dan Puskesmas Tapa Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.
8. Untuk mengetahui administrasi obat di Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo dan Puskesmas Tapa Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.
9. Untuk mengetahui pemantauan dan evaluasi obat di Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo dan Puskesmas Tapa Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengelolaan obat agar pengelolaan obat dapat efisien di Puskesmas Sibatana Kota Gorontalo dan Puskesmas Tapa Kabupaten Bone Bolango.

1.4.2 Bagi Instalasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak di Puskesmas Sibatana Kota Gorontalo dan Puskesmas Tapa Kabupaten Bone Bolango yang berkaitan dengan pengelolaan obat.